

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Motto.....	vii
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Skema.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
1.3.1. Tujuan Penelitian	17
1.3.2. Manfaat Penelitian	18
1.4. Metode Penelitian.....	18
1.4.1. Tipe Penelitian	18

1.4.2. Pendekatan Masalah	18
1.4.3. Bahan Hukum	19
1.5. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	20
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	20
BAB II IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI	22
2.1. Izin Usaha Pertambangan (IUP).....	22
2.1.1. Prinsip Pemberian IUP.....	23
2.1.2. Jenis Izin Usaha Pertambangan	24
2.1.2.1. IUP Eksplorasi	24
2.1.2.2. IUP Operasi Produksi	28
2.1.3. Pihak yang dapat mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) 31	
2.1.4. Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan	34
2.1.5. Syarat dan Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan	37
2.1.6. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan.....	42
2.2. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	55
2.2.1. Jenis Wilayah Izin Usaha Pertambangan	55
2.2.2. Kewenangan dan Prosedur Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan.....	56
2.3. Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam	64
2.4. Perbedaan Sistem Konsesi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). 66	
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH INVESTOR.....	69
3.1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)	69

3.1.1. Macam-macam Keputusan	72
3.1.2. Cara Memperoleh Wewenang	74
3.1.3. Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik	76
3.1.4. Perlindungan Hukum	83
3.2. Izin Sebagai Instrumen Pemerintah.....	85
3.2.1. Pengertian Izin	85
3.2.2. Fungsi dan Tujuan Izin	92
3.3. Upaya Hukum atas Pencabutan IUP Operasi Produksi.....	93
3.3.1. Upaya Administratif atas Pencabutan IUP Operasi Produksi...	95
3.3.2. Upaya PTUN atas Pencabutan IUP Operasi Produksi.....	96
3.3.2.1. Gugatan.....	96
3.3.2.2. Banding.....	99
3.3.2.3. Kasasi.....	100
3.3.2.4. Peninjauan Kembali.....	101
BAB IV PENUTUP	105
4.1. Kesimpulan	105
4.2. Saran.....	106
Daftar Pustaka.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kewajiban Pemegang IUP.....	43
Tabel 2. Tindak Pidana dan Sanksi sesuai Subyek Hukum.....	51
Tabel 3. Perbandingan Sistem Konsesi dengan IUP	67
Tabel 4. Perbandingan Delegasi dan Mandat	75
Tabel 5. Perbedaan Delegasi dan Mandat menurut Philipus M. Hadjon.....	76



DAFTAR SKEMA

Skema 1. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	104
---	-----

